

dialami oleh pengungsi hingga saat ini adalah belum adanya kejelasan akan nasib harta benda mereka yang telah mereka tinggalkan di Sampang dimana para warga disana memiliki rumah dan tanah serta harta benda namun tidak legal secara hukum melainkan kepemilikan sejak dahulu secara turun temurun sehingga menyebabkan banyak sekali rumah dan tanah dari para pengungsi yang diambil dan ditempati oleh orang lain sehingga tuntutan para pengungsi Syi'ah Sampang kepada pemerintah terus dilakukan namun hingga saat ini tidak ada kejelasan akan harta mereka.

Tekanan-tekanan yang terjadi menyebabkan banyak konflik yang ada dalam diri para pengungsi konflik sampang ini yang menyebabkan mereka harus terus beradaptasi dengan apa yang terjadi atau bahkan menerima kondisi apapun yang mereka alami sehingga dibutuhkan adanya cara bagi para pengungsi untuk terus bertahan dalam kondisi penuh dengan tekanan dan ketidakpastian tersebut.

B. Usaha Bertahan di Pengungsian

Sudah hampir enam tahun komunitas Syi'ah Sampang mengungsi di pengungsian Jemundo, dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya konflik membuat penduduk setempat sampai sekarang masih belum bisa kembali kekampung halaman, entah sampai kapan nasib mereka tidak ada kejelasan sehingga secara langsung mengganggu bahkan menghentikan aktifitas sehari-hari yang sudah menjadi rutinitas penduduk. Dikarenakan aktifitas yang terganggu

pengusiran dari lahan ekonomi yang menjadi keahlian mereka, yakni bertani, kini di pengungsian harus kehilangan modal keahlian ekonomi mereka. Kemampuan bertani untuk menyambung hidup harus berhenti seketika. Aktivitas sehari-hari yang sudah menjadi rutinitas dari kelompok ini terhenti dan terganti. Mereka hanya menunggu uluran tangan para dermawan dan bantuan pemerintah untuk bisa bertahan hidup. Hal ini jelas menambah panjang rentetan kemiskinan para penganut Shyi'ah yang notabennya warga resmi di Indonesia dan terlindungi hak hidupnya oleh undang-undang yang berlaku.

Memang perekonomian para pengungsi ini masih sepenuhnya ditanggaung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun banyak dari pengungsi mengaku tidak cukup dan akhirnya mencari lapangan pekerjaan dengan menjadi buruh di pasar Puspa Agro, ada yang menjadi pedagang, dan beberapa diantaranya menjadi buruh pabrik di luar kota atau bahkan ada yang menjadi pekerja di Malaysia. Para remaja yang sudah lulus dari SMA sederajat kebanyakan juga kerja menjadi buruh pabrik atau pun membantu kedua orang tua mereka yang sedang berdagang. Hal ini mereka lakukan untuk meringankan beban orang tua, juga untuk menambah pemasukan keluarga. Karena bila hanya mengandalkan persangan pemerintah yang tidak jelas tanggal turunnya meskipun rutin tiap bulan belum cukup memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Aktivitas para perempuan di Rusun lebih fokus mengurus anak dan keluarganya, sedangkan aktivitas laki-laki lebih pada mencari nafkah.

campur tangan Pemerintah yang di anggap selama ini lalai dan tidak serius dalam menangani kasus pengungsi ini.

Direktur Aman Indonesia Ruby Khalifah juga menyatakan penyelesaian kasus pengungsi Syi'ah Sampang tidak bisa lagi diserahkan kepada pihak Pemprov Jawa Timur. Meski terbebani dalam menangani kasus ini, namun Pemprov Jawa Timur terkesan tidak mau mendorong proses penyelesaiannya.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Saefullah Yusuf yang diberi mandat untuk menyelesaikan kasus ini malah secara eksplisit menyatakan bahwa penyelesaian secara rekonsiliatif itu sangat berat. Menurut Saefullah, ada tekanan yang kuat dari sejumlah kiai di Madura terhadap Pemprov Jawa Timur terkait kasus ini. Selain itu, sikap Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jawa Timur yang mengeras menjadi bagian yang membuat proses penyelesaian kasus ini mandek di jalan.

Hampir semua petinggi NU dan MUI di Jawa Timur menyatakan Syi'ah itu sesat. Tapi mereka tidak mau tahu bagaimana kehidupan para penganut Syiah Sampang di pengungsian. Itu yang membuat mereka tidak punya sikap empati terhadap para pengungsi Syiah Sampang, Berhubung Pemprov Jawa Timur dirasa sudah tidak bisa diharapkan menyelesaikan kasus konflik Sampang, Ruby mendorong Pemerintah Pusat yang mengambil alih. Langkah pertama yang perlu dilakukan Presiden Jokowi adalah menindaklanjuti janji presiden sebelumnya untuk menyelesaikan kasus Syiah Sampang dan memulangkan para pengungsi ke kampung halaman dengan aman dan damai.

Janji itu pernah dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat masih menjabat. Janji itu dikuatkannya lagi saat ia menemui perwakilan pengungsi Sampang di Cekeas pada Juli 2013 setelah mereka melakukan aksi gowes sepeda dari Surabaya. “Janji itu jangan dilihat hanya janji seorang SBY. Tapi lihat janji itu sebagai janji seorang Presiden Indonesia. Dengan begitu, janji itu harus di tindak lanjuti oleh Presiden”, tutur Ruby²¹.

Rekonsiliasi yang diharapkan tentu tercapainya kesepakatan yang disetujui oleh dua pihak yang berkonflik secara formal yang ditengahi oleh pemerintah. Bukan rekonsiliasi dalam kerangka pertobatan. Karena itu, prasyarat bahwa pengungsi Sampang bisa dikembalikan ke rumah mereka masing-masing setelah mereka menjadi Suni seperti yang diinginkan sejumlah pihak, haruslah ditolak.

Untuk menuntaskan janji yang pernah dilontarkan mantan Presiden SBY itu, Presiden Jokowi bisa menggunakan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS) Nomor 7 Tahun 2012. Salah satu poin dari UU itu dikatakan bahwa untuk penyelesaian konflik secara rekonsiliatif harus dibentuk satuan tugas yang bersifat *ad hoc* yang di dalamnya terdiri dari sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Politik, Hukum, dan Keagamaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian lainnya.

²¹ Irwan Amrizal <http://NasibMalangPengungsiSyiahSampangdanJanjiPresidenyangBelumDilunasi-MadinaOnline.htm>

